

**KOORDINASI PEMANGKU KEPENTINGAN  
DALAM MENINGKATKAN STRATEGI PENGEMBANGAN  
DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO) DI PANGANDARAN  
(Studi pada Disparperindagkop UMKM dan Kecamatan Pangandaran  
Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)**

**Anya Risnawati Soerya Putri & Nunung Munawaroh**

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

anyarisnawati@gmail.com

*ABSTRACT*

*Pangandaran is the first tourist destination in Indonesia applied the concept of DMO. The background of the problem focused in improving the operation of tourism where the government needs to make strategic coordination across sectors at the level of policies, programs, and activities of tourism. In the implementation of the DMO in Pangandaran there some problems caused by the weakness of tourism has been managed partially.. Stakeholders involved in the management of Pangandaran are not coordinated and less integrated with each other. In this study, researchers used qualitative research methods. Data were collected through observation, documentation, and interviews. The theory used in the opinion E.F.L. Brech in Hasibuan (2007: 85) that coordination is “offset and moving the team to provide a suitable location with the work activities of each and keep the activities carried out with proper alignment between the members themselves”. Based on the analysis of authors, suggest that the mechanism of coordination of stakeholders in enhancing the development strategy of the DMO is done with two (2) phases where phase 1 focused on the theme of Tourism Development Sustainable Supporting Biodiversity where planning masterplans tourism Disparperindagkop SMEs bottom-up, involving the combination and coordination from government, stakeholders and the local community as witnesses of tourism as well as their adaptation concept that refers to the concept of mangrove forest recovery. Phase 2 refers to sustainable tourism to energy efficiency through adaptation and mitigation activities with programs STREAM (Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures), where mitigation through detection disaster early detection of tourism refers to how the efficiency of the canopy energy in the destination tourism. Barriers that occur are: 1). the problem of waste in coastal areas, 2). Communication is built not optimal, 3). FGD have not shown optimal results because only representatives were present and their dissemination to the lower ranks, 4). Not all stakeholders are committed to realizing the success of the implementation of the DMO program. Efforts are being made, 1). Coordination of all relevant stakeholders. 2). Introduction of destinations and products, 3). Training of tourism businesses. 4). Make Pangandaran tourism profile. 5) Planning beach tourist facilities, 5). Planning the relocation of traders.*

**Keyword:** *coordination, stakeholders and tourism destination*

ABSTRAK

Pangandaran adalah tujuan wisata pertama di Indonesia yang menerapkan konsep DMO. Latar belakang pelaksanaannya difokuskan pada masalah peningkatan operasi pariwisata dimana pemerintah perlu membuat koordinasi strategis lintas sektor pada tingkat kebijakan, program, dan kegiatan pariwisata. Dalam pelaksanaan DMO di Pangandaran terdapat masalah yang disebabkan oleh manajemen pariwisata yang lemah akibat pengelolaan pariwisata Pangandaran masih parsial. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Pangandaran tidak terkoordinasi dan kurang terintegrasi satu sama lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teori yang digunakan dalam pendapat E.F.L. Brech di Hasibuan (2007: 85) bahwa koordinasi adalah “mengimbangi dan memindahkan tim untuk menyediakan lokasi yang sesuai dengan kegiatan kerja masing-masing dan menjaga kegiatan yang dilakukan dengan penyesuaian yang tepat antara anggota itu sendiri”. Berdasarkan analisis penulis, menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi stakeholders dalam meningkatkan strategi pengembangan DMO dilakukan dengan dua (2) fase dimana fase 1 difokuskan pada tema Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Mendukung Keanekaragaman Hayati di mana perencanaan masterplan pariwisata Disparperindagkop UKM bottom-up, melibatkan kombinasi dan koordinasi dari pemerintah. Tahap 2 mengacu pada pariwisata berkelanjutan untuk efisiensi energi melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi dengan program STREAM (Pariwisata Berkelanjutan melalui Efisiensi Energi dengan Adaptasi dan Tindakan Mitigasi). Hambatan yang terjadi adalah: 1). Komunikasi dibangun tidak optimal, 2). FGD belum menunjukkan hasil yang optimal karena hanya perwakilan yang hadir dan diseminasi ke peringkat yang lebih rendah, 3). Tidak semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program DMO. Upaya yang dilakukan, 1). Koordinasi semua pemangku kepentingan yang relevan. 2). Pengenalan tujuan dan produk, 3). Pelatihan bisnis pariwisata. 4). Membuat profil pariwisata Pangandaran. 5) Perencanaan fasilitas wisata pantai, 5). Merencanakan relokasi pedagang.

**Kata kunci:** koordinasi, pemangku kepentingan, dan tujuan wisata

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/seg

manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha. Maka untuk mengoptimalkan kontribusi manfaat pariwisata, diperlukan koordinasi dalam pola perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 pada Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata Pasal 51 menyebutkan bahwa: “Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat”. Hal tersebut menunjukkan bagaimana koordinasi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan pariwisata nasional sangatlah diperlukan. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, 10 kecamatan yang ada di kawasan tersebut resmi lepas dari Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten tersendiri. Kabupaten Pangandaran terdiri atas Kecamatan Cigugur, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, Langkaplancar, Mangunjaya, Padaherang, Pangandaran, Parigi dan Sidamulih. Setelah peresmian DOB Kabupaten Pangandaran, pengembangan pariwisata di wilayah tersebut juga didukung program “*Destination Management Organization*” (DMO) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pada 2013, target DMO dalam hal kelembagaan adalah penguatan internal kelembagaan dalam menyusun sistem dan mekanisme keorganisasian, melakukan kolaborasi dan harmonisasi program dengan pemerintah provinsi dan koordinasi dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata.

Hasil dari DMO dalam hal kelembagaan yang sudah tercapai adalah adanya penguatan aparatur pemerintah

Pangandaran mengenai kepariwisataan, dukungan pemerintah provinsi, kerja sama kolaboratif dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan program, munculnya inisiatif pemangku kepentingan dalam kegiatan dan penguatan kelembagaan desa.

Kabupaten Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat merupakan contoh sukses penerapan *Destination Management Organization* (DMO). Dengan penerapan ini, Pangandaran telah menjadi model bagi pengembangan pariwisata di seluruh dunia. Pangandaran merupakan destinasi wisata pertama di Indonesia yang diterapkan konsep DMO.

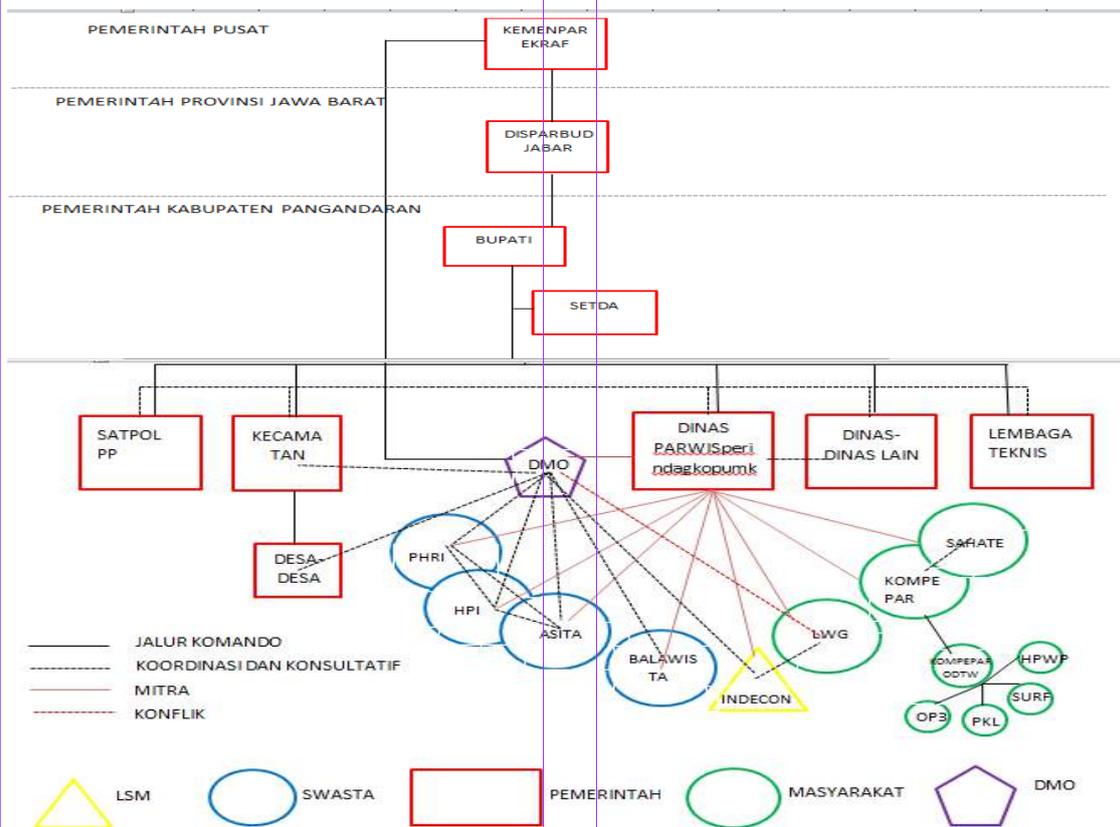
DMO yang merupakan inisiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2010 serta hasil dari pemikiran masyarakat LWG bertindak sebagai mitra pemerintah daerah, dalam hal ini Disparperindagkop UMKM. Dinas Parwisperindagkop UMKM merupakan *leading sector* pada bidang pariwisata Pangandaran sebagai penggerak pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan kawasan Pangandaran yang berbasis pariwisata. Dinas Parwisperindagkop UMKM tentu berkoordinasi dengan pihak pemerintahan lainnya seperti dinas-dinas dan badan-badan, serta kecamatan dan desa. Sedangkan pihak swasta, masyarakat, NGO mitra pemerintah, dalam hal ini Dinas Parwisperindagkop UMKM dalam menjalankan tugas pemerintahannya dan bersama mewujudkan pariwisata Kabupaten Pangandaran yang lebih memiliki daya saing yang mendunia.

Begitu pesatnya perkembangan pariwisata di Pangandaran ini ternyata menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti degradasi lingkungan, dualisme manajemen obyek wisata yang

mengakibatkan manajemen yang tidak efektif, rumah-rumah masyarakat yang berubah fungsi menjadi penginapan, permasalahan PKL, usaha informal rental sepeda, perahu, masalah persampahan, dan berbagai masalah lainnya di Pangandaran. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh Organisasi Lokal Pangandaran atau *Local Working Group (LWG)* Pangandaran dalam buku *Development of Destination Management Organization, Tourism Development Supporting Biodiversity Conservation in Pangandaran Indonesia*, permasalahan tersebut diakibatkan oleh manajemen pariwisata yang lemah akibat masih parsialnya pengelolaan pariwisata Pangandaran. Pemangku kepentingan yang

terlibat dalam pengelolaan Pangandaran tidak berkoordinasi dan kurang terintegrasi satu sama lain. Gambaran mengenai jalur koordinasi Dinas Parwisperindagkop UMKM beserta pihak pemerintah lainnya, posisi pihak swasta, masyarakat, dan DMO tampak pada gambar 1 di bawah.

Dapat dilihat bahwa dalam TKDP Pangandaran, Disparperindagkop UMKM telah membangun mitra dengan pihak masyarakat, swasta, dan NGO. Selain itu, memiliki garis koordinasi pula dengan kecamatan, badan, dan dinas lainnya. Namun, hingga saat ini dinas belum dapat menjalankan peranannya dalam mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan kepariwisataan secara



Gambar 1

Hubungan Para Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam TKD Pangandaran

Sumber: Hasil Analisis 2015 (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK V4N3)

optimal karena adanya kekurangan SDM internal dari dinas itu sendiri dan dari segi jumlah maupun kapasitasnya, struktur Disparperindagkop UMKM yang terlalu 'gemuk', dsb, sebagai mitra pemerintah yang terdiri dari masyarakat baik lokal maupun utusan dari kementerian yang memiliki kapasitas dan wawasan dalam manajemen pariwisata. Hal itulah yang mendasari terbentuknya DMO pada 2010 di Pangandaran.

Dalam implementasinya, DMO yang seharusnya menjadi mediator penengah antara pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah ternyata belum dapat menjalankan perannya dengan optimal. Sebagaimana dapat dilihat di atas, DMO Pangandaran tidak memiliki garis koordinasi dengan pihak masyarakat, baik dari LWG, Kompepar, maupun tokoh masyarakat. Pada dasarnya, secara teori mereka memiliki garis koordinasi. Pihak masyarakat kecuali LWG pun tetap diundang apabila terdapat pertemuan, workshop, seminar, atau program-program yang difasilitasi DMO. Namun, dalam keberjalanannya ternyata pihak DMO dan masyarakat memiliki hubungan yang tidak begitu baik. Secara umum, pihak masyarakat menilai bahwa DMO masih hanya berupa kelengkapan untuk kalangan tertentu, terlalu teoretis, dan masih kurang implementasi di lapangan sehingga masyarakat merasa jenuh. Selain itu, DMO memiliki konflik internal dengan LWG sehingga LWG tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan DMO dan kolaborasi pemangku kepentingan.

Dalam hal ini strategi Disparperindagkop UMKM dalam pengembangan DMO di kabupaten Pangandaran terkendala dalam melaksanakan koordinasi dengan semua

pemangku kepentingan yang terkait maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain sebagai berikut.

1. Terjadinya degradasi lingkungan
2. Terdapatnya dualisme manajemen obyek wisata yang mengakibatkan manajemen yang tidak efektif.
3. Banyak rumah-rumah masyarakat yang berubah fungsi menjadi penginapan.
4. Permasalahan PKL.
5. Adanya usaha informal rental sepeda, perahu.
6. Masalah persampahan.
7. DMO yang seharusnya menjadi mediator penengah antara pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah ternyata belum dapat menjalankan perannya dengan optimal
8. DMO Pangandaran tidak memiliki garis koordinasi dengan pihak masyarakat, baik dari LWG, Kompepar, maupun tokoh masyarakat.
9. Pihak masyarakat menilai bahwa DMO masih terlalu teoretis.
10. Masih kurang implementasi di lapangan sehingga masyarakat merasa jenuh.
11. DMO memiliki konflik internal dengan Organisasi Lokal Pangandaran atau *Local Working Group* (LWG).

#### **Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan dalam latar belakang peneliti lebih memfokuskan pada fungsi Tim DMO sebagai mediator dalam manajemen pariwisata yang lemah akibat masih parsialnya pengelolaan pariwisata Pangandaran.

<p><b>Rumusan Masalah</b></p> <p>Berdasarkan batasan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi pengembangan <i>Destination Management Organization</i> (DMO) di Pangandaran?</li> <li>2. Apa saja hambatan dari sistem kerja tim DMO dalam melaksanakan koordinasi sebagai mediator?</li> <li>3. Bagaimana upaya Disparperindagkop UMKM sebagai <i>leading sector</i> dan sebagai penggerak pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pangandaran yang berbasis Pariwisata?</li> </ol> <p><b>TINJAUAN TEORETIS</b></p> <p>Menurut pendapat E.F.L. Brech dalam Hasibuan (2007: 85) bahwa, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.</p> <p>Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana (2011: 33) menyatakan koordinasi sebagai berikut.</p> <p>Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.</p>	<p>Menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011: 86) koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.</p> <p><b>Bentuk Koordinasi</b></p> <p>Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011: 35), Bentuk Koordinasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi Horizontal             <p>Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspida Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres) dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).</p> </li> <li>b. Koordinasi Vertikal             <p>Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain di luar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain di luar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.</p> </li> <li>c. Koordinasi Fungsional             <p>Koordinasi fungsional adalah penyelarasan kerja sama secara</p> </li> </ol>
--	---

harmonis dan sinkron antarlembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya koordinasi antara unit-unit suatu organisasi.

## METODE YANG DIGUNAKAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana di dalam metode kualitatif memandang realitas sebagai objek penelitian tanpa ada pengaruh apa pun terhadap objek tersebut. Di dalam metode ini analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan serta menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dalam koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi pengembangan DMO di kabupaten Pangandaran.

### Analisis

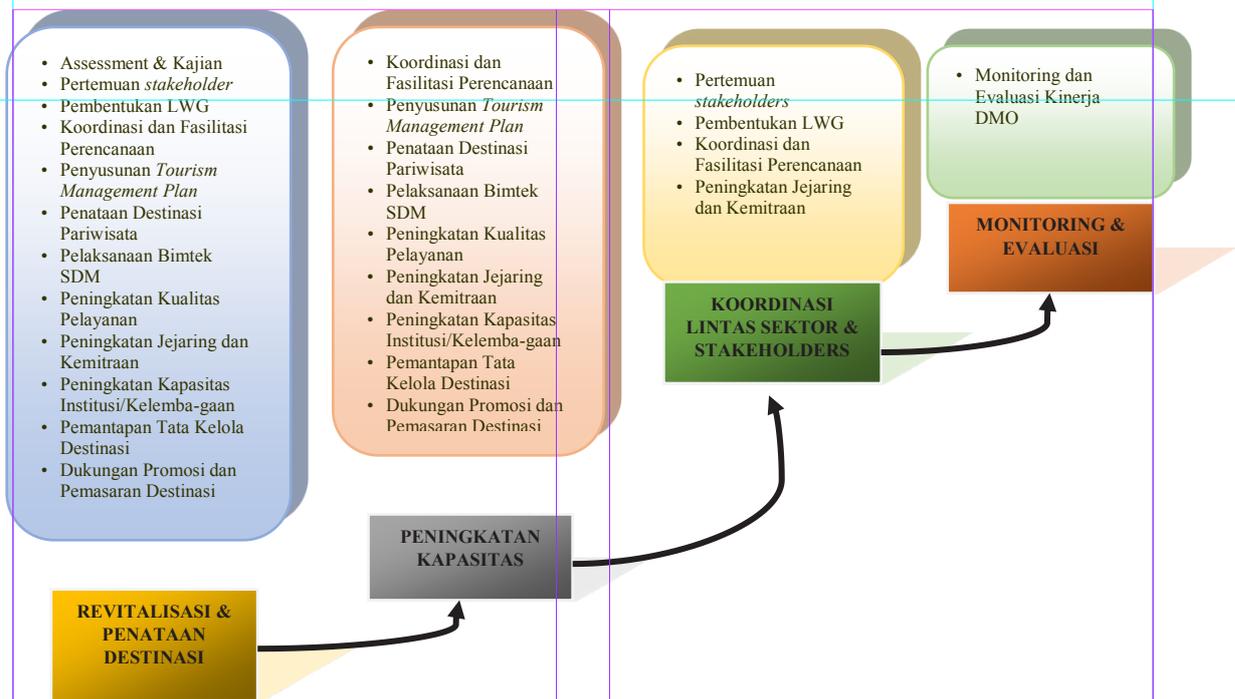
1. Mekanisme koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi pengembangan *Destination Management Organization* (DMO) di pangandaran

Dalam pelaksanaannya, upaya pengembangan kepariwisataan pada dasarnya melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang saling dibutuhkan dan membutuhkan satu sama lainnya yaitu pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha (industri), lingkungan (alam dan budaya), masyarakat-wisataan (wismas dan wisnus) maka pemikiran konsep pengelolaan destinasi pariwisata hendaknya

didasarkan atas model pengelolaan yang melibatkan pemangku kepentingan di lokasi destinasi yang bersangkutan tidak termasuk wisatawan dalam suatu wadah Lembaga Pengelola Destinasi (*Destination Management Organization*, DMO). Di dalam pengembangan destinasi di pangandaran koordinasi dari setiap pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi DMO harus bisa memperhatikan dari rangkaian tahapan dan proses pembentukan dan pengembangan DMO secara umum yang memiliki inti aktivitas pembentukan dan pengembangan DMO, dimana hal ini Disparperindagkop UMKM mempunyai peranan yang sangat penting memberikan pembinaan-pembinaan terhadap semua *stakeholders* yang terkait bagaimana meningkatkan destinasi pariwisata pangandaran supaya bisa masuk dalam pariwisata dunia. Di bawah ini bagaimana adanya mekanisme perencanaan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan program DMO.

Pangandaran masuk menjadi anggota DMO, berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jawa Barat, lalu DPRD Jawa Barat telah menetapkan bahwa Pangandaran termasuk salah satu dari 15 tujuan wisata di Indonesia yang akan dikembangkan dengan konsep *Destination Management System*. Pada awalnya Pangandaran harus memenuhi 2 (dua) syarat untuk bisa masuk sebagai anggota DMO, syarat yang diajukan oleh UNWTO yaitu:

1. Adanya destinasi yang terdapat tsunami
2. Fokus perhatian pariwisata lebih kepada *biodiversity* (keanekaragaman hayati)



**Gambar 2**

Rangkaian Tahapan dan Proses Pembentukan dan Pengembangan Dmo Secara Umum Memiliki Inti Aktivitas yang digambarkan sebagai berikut.

Sumber: Petunjuk Teknis operasional Pembentukan dan Pengembangan DMO, Disparperindagkop UMKM, 2016

BAPPEDA mengajukan *assesment* kepada UNWTO sebagai organisasi kepariwisataan dunia bahwa Pangandaran dengan dua (2) prasyarat tersebut sudah terpenuhi maka pangandaran bisa masuk dalam DMO apalagi setelah terjadi tsunami di pangandaran pada 2006 sebagai salah satu prasyarat untuk masuk dalam keanggotaan DMO meskipun pada saat itu Pangandaran masih bergabung dengan Kabupaten Ciamis belum menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru).

Setelah Pangandaran ditetapkan sebagai anggota DMO maka Pangandaran menjadi *pilot project* satu-satunya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pangandaran mampu mengembangkan destinasi kepariwisataan sesuai dengan

visi pangandaran yaitu *mewujudkan kabupaten pangandaran sebagai daerah tujuan wisata dunia. Sebagai pilot project Pangandaran mengembangkan dua fase perkembangan kepariwisataan yaitu:*

- Fase I pada 2007-2009 dengan fokus pada tema Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan Pendukung Keanekaragaman Hayati.

Dengan pendekatan model DMO, pengelolaan pariwisata di Pangandaran dikembangkan dengan terlebih dulu membuat *masterplan*, tanpa mengubah tata ruang dan beberapa hal yang dilakukan adalah penyusunan dokumen perencanaan *masterplans* pariwisata, di Pangandaran dalam perencanaan tersebut

tidak dilakukan secara *top down* tetapi *bottom up* dimana masyarakat lokal Pangandaran diajarkan merumuskan masalah mau di bawa ke mana pariwisata Pangandaran ini, dalam hal ini ada *counter park*-nya yaitu *Indonesian Ecotourism Network* (Indecon). Untuk menjadi embrio/penggerak di tataran teknis maka di bentuklah yang dinamakan LWG (*Local Working Group*) yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pengembangan Tata Kelola Destinasi/*Destination Management Organization* (DMO) dan merumuskan model tata kelola yang diterapkan di masing-masing daerah. Unsur pembentukan *Local Working Group* (LWG) terdiri dari: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tokoh masyarakat, pengusaha pariwisata, asosiasi masyarakat lokal, dan pemerhati pariwisata.

Koordinasi yang dilakukan sangat baik dari setiap pemangku kepentingan dan peranan Disparperindagkop UMKM bisa membawa bagaimana masyarakat sebagai pelaku pariwisata bisa ikut terlibat dalam menentukan pengembangan destinasi pariwisata di Pangandaran. Hal ini dilakukan beberapa *stakeholders* seperti P2KP, tenaga ahli, Indecon dan beberapa pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya dan kemudian setelah menjadi dokumen rencana pariwisata Pangandaran lalu di publikasikan bukan hanya di lokal Pangandaran tetapi regional Jawa Barat bahkan di publikasikan di Berlin.

Pada fase pertama ini selain adanya penyusunan dokumen perencanaan ada juga aksi bagaimana pemulihan terumbu-terumbu karang yang rusak oleh tsunami makanya ada terumbu karang buatan kemudian diadopsi dengan memakai *name tag* yang diturunkan ke laut lalu di evaluasi pertumbuhannya pada setiap

bulannya. Dalam hal ini, tugas tersebut diajarkan kepada anak-anak usia dini, anak sekolah dasar dan anak sekolah menengah pertama bagaimana pariwisata berkelanjutan dalam konteks kemampuan berpikir mereka bagaimana menanamkan cinta lingkungan, cinta terhadap pariwisata pendukung keanekaragaman hayati, begitupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

b. Fase II pada 2011-2013 dengan fokus bagaimana kesadaran dunia pariwisata pada sensitivitas perubahan pemanasan global, perubahan iklim dengan judul *STREAM (Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures)* atau pariwisata berkelanjutan dengan energi efisiensi melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi.

Proporsi wisata alam di pangandaran lebih besar dibandingkan dengan wisata budaya karena bersifat alam maka pemanasan global akan lebih tinggi misalnya di destinasi *green canyon* seandainya terjadi curah hujan yang sangat tinggi maka air akan meluap dan *Green canyon* tidak lagi menjadi *green* tetapi menjadi *brown canyon* yang menjadikan tidak aman untuk aktivitas pariwisata sehingga Disparperindagkop UMKM harus menutup sementara untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan yang datang ke pangandaran.

Pada fase II banyak hal yang bermanfaat bagi pemilik hotel karena ada audit energi yang dibiayai penuh oleh UNWTO. Hal ini dilakukan program kesadaran bagi pengelola hotel, restoran bagaimana ramah terhadap lingkungan, adanya efisiensi terhadap energi tetapi banyak wisatawan yang menginap di hotel sekitar pangandaran tidak memahami

pentingnya hemat energi maka ada 13 buah hotel di pangandaran yang dijadikan contoh dimana dari sarana prasarana dan pelaku usaha yang termasuk dalam PHRI sudah dilakukan penyadaran akan adanya *global warning* dengan secara stimulan mengganti sarana yang memakan energi tinggi di ganti dengan sarana yang baru hemat energy. Dalam pelaksanaan sadar energi ini ada kelompok yang bernama CAMPERNIK yang membuat prakarya dari limbah plastik bekas, bungkus rokok, plastik bekas minyak goreng untuk dijadikan tas, dompet dan tempat tisu dan sudah di ekspor ke luar negeri dan hal ini akhirnya di biyai oleh Bank Indonesia secara penuh.

Program DMO ini di munculkan oleh kementerian pariwisata dengan penuh energi, semangat, dalam meningkatkan tata kelola pariwisata. Melalui terbentuknya FTKP (Forum Tata Kelola Pariwisata) sebagai tindak lanjut program DMO, maka fasilitasi kegiatan diyakini akan berdampak pada penguatan daya saing pariwisata Pangandaran. Forum ini merupakan wadah tempat berkumpulnya para pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkoordinasi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah destinasi, baik perbaikan regulasi, pengembangan sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan agar berjalan baik, berdaya

**Tabel 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**FORUM TATA KELOLA PARIWISATA (FTKP)**  
**PANGANDARAN**

1.	Dewan Pembina	:	Bupati Pangandaran Unsur MUSPIDA Kabupaten Pangandaran
2.	Penanggung Jawab	:	SEKDA Kabupaten Pangandaran
3.	Ketua Umum	:	ASDA II Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
	Wakil Ketua I	:	Kadis Pariwisata PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Pangandaran
	Wakil Ketua II	:	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Pangandaran
	Wakil Ketua III	:	Ketua BALAWISTA (Tokoh Muda Masyarakat)
4.	Sekretaris	:	SEKDIS Pariwisata PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Pangandaran
	Wakil Sekretaris I	:	KABAG Ekonomi SETDA Kabupaten Pangandaran
	Wakil Sekretaris II	:	Fasilitator Lokal DMO Pangandaran
	Wakil Sekretaris III	:	Ketua Kompepar Green Canyon Kabupaten Pangandaran
5.	Bendahara	:	Kepala DPPKAD Kabupaten Pangandaran Kasi Sarana Prasarana Dinas Pariwisata PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Pangandaran

tarik dan berkelanjutan. Lampiran Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Program DMO Pangandaran terdapat pada tabel 1 di muka.

Dalam Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Pangandaran untuk optimalisasi organisasi maka dibuat Kelompok Kerja, terdiri atas POKJA DMO A meliputi: (1) Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) Penataan Ruang, dan (3) Penataan Infrastruktur. POKJA DMO B meliputi: (1) Penguatan dan Pengembangan Produk Wisata; (2) Pengembangan Seni dan Budaya; (3) Promosi dan Pemasaran. POKJA DMO C meliputi: (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Kelembagaan; (2) Kerja sama dan Kemitraan; (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Kelembagaan; dan (4) Kerja sama dan Kemitraan. POKJA DMO D meliputi Ketentraman dan Ketertiban. Setiap Kelompok Kerja didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terkait dan dipandang memiliki relevansi yang signifikan/sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pengembangan DMO**

Dalam pelaksanaannya, DMO yang seharusnya menjadi mediator penengah antara pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah ternyata belum dapat menjalankan perannya dengan optimal masih terdapat hambatan-hambatan dalam pengembangan program DMO.

a. Permasalahan yang sangat krusial pada destinasi pariwisata pangandaran adalah sampah di mana-mana apalagi setelah hari raya dan tahun baru. Dalam hal ini kecamatan hanya mengarahkan

masyarakat melalui desa tetapi tidak dilibatkan dalam pembangunan dan tidak ada koordinasi dari dinas atau kabupaten.

- b. Komunikasi yang dibangun belum optimal, masih ada anggota kolaboratif yang belum sepenuhnya mampu mengutarakan aspirasi, gagasan, dan lain-lain secara terbuka..
- c. Setiap tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga kolaboratif tersebut, sebelumnya direncanakan secara bersama melalui forum curah pendapat. Meskipun demikian hal tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan yang hadir hanyalah delegasi-delegasinya saja sebagai perwakilan dan banyak yang tidak hadir untuk mengikuti FGD ini sehingga pada saat penyampaian hasil FGD tergantung masing-masing pimpinannya dari *stakeholders* tersebut untuk mensosialisasikan yang kemungkinan tidak sampai kepada jajaran dibawahnya.
- d. Secara umum pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mewujudkan keberhasilan dari implementasi program DMO Pangandaran. Namun belum semuanya memiliki keinginan yang sama, sehingga optimalisasi dan sinergi pemangku kepentingan harus terus dibangun.

#### **Upaya Disparperindagkop UMKM sebagai *leading sector* dan sebagai penggerak pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pangandaran yang berbasis Pariwisata.**

1. Mengadakan pertemuan dan koordinasi; dengan pemerintahan kabupaten, provinsi, instansi lain di kabupaten, komite pembentukan

<p>DMO dan masyarakat luas.</p> <p>2. Adanya media informasi publik; buletin, tata informasi, situs <i>website</i>.</p> <p>3. Pengenalan destinasi dan produk; membuat jelajah Pangandaran.</p> <p>4. Kolaborasi pengelolaan; membuat penataan dan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru.</p> <p>5. Pelatihan pemanduan ekowisata; pesertanya adalah pemandu HPI dari Pangandaran, Panjalu, Karang Kamulyaan dengan materi pelatihan mengacu pada standard SKNNI ekowisata yang disusun Kemenbudpar UMKN.</p> <p>6. Pelatihan pelayanan prima; pesertanya adalah hotel-hotel di pangandaran (staff bagian <i>front office</i> dan <i>Food&amp;Beverage</i>) dengan materi mengacu kepada materi sertifikasi hotel.</p> <p>7. Pelatihan kewirausahaan; pesertanya perwakilan berbagai usaha dagang dan jasa pantai dengan materi pelatihan meliputi kewirausahaan, pengelolaan keuangan mikro, manajemen usaha.</p> <p>8. Membuat profil pariwisata Pangandaran yang meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Daya tarik wisata alam</li> <li>ii. Daya tarik wisata budaya</li> <li>iii. Lokal ekonomi masyarakat terkait termasuk lapangan pekerjaan terkait pariwisata dan profil pekerja pariwisata</li> <li>iv. Fasilitas wisata; termasuk hotel, restoran dan fasilitas publik</li> <li>v. Pasar wisatawan; termasuk jumlah, asal, umur, persepsi dan penilaian</li> </ul> <p>9. Perencanaan fasilitas wisata pantai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahapan survei yang telah dilakukan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pengumpulan data sekunder</li> <li>ii. Survei lapangan (pengukuran, perhitungan, etc)</li> <li>iii. Wawancara dengan pedagang, kapal wisata, pemangku kepentingan pariwisata lain</li> </ul> </li> <li>▪ Tahapan pertemuan yang telah dilakukan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pertemuan pertama dengan asosiasi pedagang, kompepar dan ketua komite DMO</li> <li>ii. Pemaparan hasil survei kepada ketua DMO</li> </ul> </li> </ul> <p>10. Merencanakan relokasi pedagang-pedagang yang ada di depan pantai agar pemandangan langsung ke pantai menjadi indah dan tertata kebersihannya.</p> <p>11. Edukasi penanaman pohon mangrove bagi anak-anak sekolah di Pangandaran dan wisatawan yang datang ke pangandaran.</p> <p>12. Sosialisasi kampanye sadar energi, kampanye sadar wisata, kampanye peduli lingkungan.</p> <p><b>SIMPULAN DAN SARAN</b></p> <p><b>Simpulan</b></p> <p>Simpulan dalam koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi DMO di kabupaten Pangandaran, sebagai berikut.</p> <p>1. Pangandaran menjadi <i>pilot project</i> pariwisata satu-satunya di Indonesia dengan mengembangkan 2 fase perkembangan kepariwisataan yaitu Fase I pada 2007-2009 dengan</p>
---	--

<p>fokus pada tema Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan Pendukung Keanekaragaman Hayati. Dan Fase II pada 2011-2013 dengan fokus bagaimana <i>aware</i>-nya dunia pariwisata pada sensitivitas perubahan pemanasan global, perubahan iklim dengan judul <i>STREAM (Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures)</i> atau pariwisata berkelanjutan dengan energi efisiensi melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi. Dalam penyusunan dokumen perencanaan <i>masterplans</i> pariwisata, di Pangandaran dilakukan secara <i>bottom up</i> dimana masyarakat lokal diajarkan merumuskan masalah pariwisata Pangandaran dan sebagai sarana dalam melaksanakan koordinasi dari setiap <i>stakeholders</i> kepariwisataan. Untuk menguatkan koordinasi antarsetiap pemangku kepentingan pengembangan pariwisata di Pangandaran melalui terbentuknya FTKP (Forum Tata Kelola Pariwisata) sebagai tindak lanjut program DMO, maka fasilitasi kegiatan diyakini akan berdampak pada penguatan daya saing pariwisata Pangandaran.</p> <p>2. Hambatan-Hambatan dari sistem kerja tim DMO dalam melaksanakan koordinasi sebagai mediator adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan yang sangat krusial pada destinasi pariwisata pangandaran adalah sampah di mana-mana apalagi setelah hari Raya dan Tahun Baru.</li> <li>Komunikasi yang dibangun belum optimal, masih ada anggota kolaboratif yang belum sepenuhnya mampu</li> </ol>	<p>mengutarakan aspirasi, gagasan, dan lain-lain secara terbuka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Forum curah pendapat dalam bentuk FGD belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan hanya delegasi-delegasi dari setiap pemangku kepentingan terkait sebagai perwakilan saja sehingga kurang adanya sosialisasi kepada jajaran di bawahnya.</li> <li>Belum semua pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mewujudkan keberhasilan dari implementasi program DMO Pangandaran sehingga optimalisasi dan sinergi pemangku kepentingan harus terus dibangun.</li> </ol> <p>3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang dilakukan Disparperindagkop UMKM dalam mewujudkan Pangandaran yang berbasis Pariwisata secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut. Mengadakan perekaman massal di seluruh desa di wilayah Kabupaten Bandung.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait.</li> <li>Pengenalan destinasi dan produk; membuat jelajah Pangandaran melalui media informasi publik; buletin, tata informasi, situs <i>website</i></li> <li>Pelatihan pemanduan ekowisata, pelatihan pelayanan prima, pelatihan kewirausahaan terhadap pelaku usaha pariwisata.</li> <li>Membuat profil pariwisata Pangandaran.</li> <li>Perencanaan fasilitas wisata pantai</li> </ol>
---	--

- f. Perencanaan relokasi pedagang-pedagang yang ada di depan pantai agar pemandangan langsung ke pantai menjadi indah dan tertata kebersihannya.
- g. Edukasi penanaman pohon mangrove bagi anak-anak sekolah di Pangandaran dan wisatawan yang datang ke pangandaran.
- h. Sosialisasi kampanye sadar energi, kampanye sadar wisata, kampanye peduli lingkungan.

**Saran**

Adapun saran dari penulis, sebagai berikut.

1. Intensitas pertemuan dengan para stakeholders diharapkan sebagai dasar pembentukan kesadaran kolektif (*collective awareness*) tentang Tata Kelola Destinasi/*Destination Management Organization*, peran, kontribusi dan manfaat yang diterima bagi masing-masing stakeholders dan masyarakat lokal. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan harus memperketat regulasi bagi penguatan koordinasi antarpelaku usaha dan pemangku kepentingan merupakan salah satu upaya berkesinambungan yang perlu selalu dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata dan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai komponen pembangunan untuk bersinergi membangun kekuatan daya saing pariwisata di Pangandaran melalui program DMO yang berkelanjutan.
2. Dengan adanya forum curah pendapat dengan metode FGD diharapkan bisa lebih meningkatkan

komunikasi dan koordinasi bagi semua pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tidak hanya perwakilan/delegasi-delegasi dari pemangku kepentingan terkait tetapi seluruh stakeholders bisa hadir bahkan masyarakatpun lebih banyak di libatkan agar permasalahan yang sangat krusial pada destinasi pariwisata Pangandaran bisa di sampaikan dengan jelas kepada pelaku pariwisata di pengandaran secara keseluruhan

3. Disparperindagkop UMKM di harapkan lebih aktif lagi melakukan koordinasi dengan Kemenparekraf dan seluruh *stakeholders* yang terkait dalam mensosialisasikan edukasi pentingnya adaptasi dan mitigasi, pentingnya tata ruang pantai pangandaran yang bersih dan terbuka untuk menarik minat wisatawan agar lebih meningkat lagi datang ke pangandaran dan juga lebih di tingkatkan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha yang ada di sekitar destinasi pariwisata Pangandaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bogdan, Robert C dan Biklen, Knoff. 1982. *Qualitative Research for Education*. New York: Allyn and Bacon, Inc

Cassel, Catherin and Symon, Gillian, 2004, *Essential Guide To Qualitative Methods In Organizational Research*: London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Creswell, W, John, 2007, *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches*: University Of Nebraska, Lincoln: Sage Publications

<p>Gibson et al, 1996. <i>Organisasi Perilaku Struktur Proses</i>. Jakarta: Binarupa Aksara</p> <p>Handayaniingrat, Soewono, 1996. <i>Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional</i>, Jakarta: Gunung Agung.</p> <p>Hasibuan, Malayu S.P., 2001. <i>Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah</i>. Jakarta: Bumi Aksara.</p> <p>----- 2007. <i>Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah</i>. Jakarta: Bumi Aksara.</p> <p>Moekijat. 1994. <i>Koordinasi Suatu Tinjauan Teoretis</i>. Bandung: Mandar Madju</p> <p>Moleong, J. Lexy, 2007, <i>Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)</i>. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.</p> <p>Nasution, S, 1988, <i>Metode penelitian Naturalistik Kualitatif</i>. Bandung: Tarsito</p> <p>Neegaard, Helle And Ulhoi, John, Parm, 2007, <i>Hand Book Of Qualitative Research Methods In Entrepreneurship</i>: USA: Cheltenham, UK, Northampton, MA.</p> <p>Neuman, Lawrence, W, 2007, <i>Basic Of Social Research Qualitative And Quantitative Approaches</i>, Second Edition, University Of Wisconsin Whitewater USA: Pearson Education, Inc.</p> <p>Noeng, Muhadjir, 1990, <i>Metode Penelitian Kualitatif</i>, Yogyakarta: Rake Sarakin</p> <p>Ndraha, Taliziduhu. 2003. <i>Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)</i>. Jakarta: Rineka Cipta.</p> <p>Osborne, David and Ted Gaebler, 1992, <i>Reinventing Government, How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector</i>. Massachusett: Addison Wesley Publishing Company.</p> <p>Stoner, James A.F dan R Edward Freeman. 1996. <i>Manajemen Jilid I &amp; II, alih bahasa Alexander Sindoro</i>. Jakarta: PT Prenhallindo.</p>	<p>Sugandha. 1991. <i>Koordinasi Alat Pemersatu Gerak administrasi</i>. Jakarta: Pradaya.</p> <p>Sugiyono, 2010, <i>Memahami Penelitian Kualitatif</i>, Bandung: Alfabeta.</p> <p>Sujamto, 1990, <i>Perspektif Otonomi Daerah</i>. Jakarta: PT. Rineka Cipta.</p> <p>Soekarno, K, 1996. <i>Dasar-dasar Manajemen</i>. Jakarta: CV Talaga Bening.</p> <p>Syarifudin, Ateng, 1993, <i>Pengantar Koordinasi Pemerintahan Daerah</i>. Tarsito: Bandung.</p> <p>Sutherland, W. Jhon, 1978, <i>Management Handbook For Public Administrators</i>, London, Toronto, Melbourne: Litton Educational Publishing, Inc</p> <p><b>Peraturan Perundang-Undangan</b></p> <p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat</p> <p>Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025</p> <p><b>Lain-Lain</b></p> <p>(<a href="http://blogs.itb.ac.id/djadja/2011/09/04/analisis-pemangku-kepentingan-stakeholders-dalam-manajemen/#sthash.RGeIcJqX.dpuf">http://blogs.itb.ac.id/djadja/2011/09/04/analisis-pemangku-kepentingan-stakeholders-dalam-manajemen/#sthash.RGeIcJqX.dpuf</a>)</p>
--	--